



**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA TERHADAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT
TAHUN 2015 (STUDI PADA DESA HILISANGAWOLA
KEC. ULU MORO'O KAB. NIAS BARAT)**

Muhammad Ansori Lubis¹
Ahmad Zukri Alrasyid²
Universitas Darma Agung Medan^{1,2}
Email : ansoriboy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2015”. Persoalan yang banyak dan sering terjadi hingga saat ini adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemilu masih sangat rendah. Selain itu, kepercayaan publik terhadap figur calon Kepala Daerah kurang berpengaruh. Konsep dan defenisi partisipasi masyarakat merupakan hal yang mendukung tentang pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Landasan teori atau tinjauan pustaka sebagai pendukung dan pedoman dalam melakukan penelitian untuk mencari solusi dan jawaban dalam penyelesaian permasalahan penelitian. Menurut (Budiardjo, 1998:2) memaknai partisipasi politik adalah : kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Selanjutnya, membahas tentang konsep tata cara dalam melakukan penelitian serta bentuk/metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian guna memantapkan si peneliti mencari jawaban yang konkrit di lapangan. Selain itu, penentuan informan juga sangat diperlukan guna memperoleh informasi dan data yang akurat guna memperdalam pembahasan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian kaulitatif dan dengan informan berjumlah (16) orang. Kesimpulan, bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu masih belum efektif dan masih sangat kurang, peran partai politik juga masih kurang, kepemimpinan kepala desa yang tidak profesional, dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu kepala daerah Nias Barat khususnya di desa Hilisangawola.

Kata Kunci : Partisipasi Dan Pemilihan Bupati

ABSTRACT

This study discusses "Public Participation in the 2015 Election of West Nias Regent and Deputy Regent". The problem that has often occurred to date is that public awareness and

concern for elections is still very low. In addition, public trust in regional head candidate figures is less influential. The concept and definition of community participation are things that support the problem solving that has been formulated previously. The theoretical basis or literature review serves as a support and guide in conducting research to find solutions and answers in solving research problems. According to (Budiardjo, 1998: 2) interpreting political participation is: the activity of a person or group of people to participate actively in political life, namely by electing state leaders and directly or indirectly, influencing government policy (public policy). This activity includes actions such as voting in general elections, attending general meetings, becoming a member of a party or interest group, making contact with government officials or members of parliament, and so on. / research methods used in conducting research to strengthen the researcher looking for concrete answers in the field. In addition, the determination of informants is also very necessary in order to obtain accurate information and data in order to deepen the discussion in research. The research method used in this research is a qualitative research method and with a total of (16) informants. In conclusion, the socialization carried out by the election organizers is still not effective and still very lacking, the role of political parties is still lacking, the village head's leadership is not professionals, and the mindset of society that is still traditional. This has led to a lack of community participation in the West Nias regional head election, especially in Hilisangawola village.

Keywords: Participation and Election of Regents

I. PENDAHULUAN

Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu yang akan kita bahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*), maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan-tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen yang digunakan rakyat untuk mewujudkan partisipasinya dalam sistem demokrasi. Masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang untuk menjadi pemilih, dapat ikut serta dalam menyampaikan hak suaranya secara langsung melalui pemungutan suara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (1) ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah pelaksanaan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pelaksanaan prinsip demokrasi yang sesungguhnya adalah menginginkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan khususnya proses kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara dijamin hak politiknya yang diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal

tersebut menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilu dan dapat menggunakan hak politiknya secara luas dalam hal memilih ataupun dipilih tanpa terikat oleh perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, golongan, dan status sosialnya dalam masyarakat. Sejak pemilu tahun 1999, Indonesia memasuki babak baru bagi pelaksanaan demokrasi karena pada tahun tersebut warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat memilih wakil rakyatnya secara langsung untuk duduk di kursi legislatif. Selanjutnya pada tahun 2004 selain pemilihan legislatif secara langsung, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung, sehingga masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam proses politik. Proses ini berlanjut setelah (5) lima tahun tepatnya pada tahun 2009 yaitu diadakan kembali pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Menurut Samuel P. Huntington (1997:5-6) menyatakan bahwa sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suaranya. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan . Rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.

Kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Hasil pemilu yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan sudah cukup mewakili partisipasi dan merupakan aspirasi masyarakat. Disadari bahwa pemilu bukan merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran kegiatan lainnya yang bersifat berkesinambungan.

Dinegara dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang dikenal didunia barat kurang diindahkan. Dalam karangannya, Budiardjo (2009:461) mengungkapkan, dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: (1) Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik); (2) Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional).

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi

faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu, sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu.

Pembelajaran dan sosialisasi pemilu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait pemilu bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Ramlan Surbakti (2007:140), partisipasi politik terbagi menjadi (2) dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Sementara itu, Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Miriam Budiarto (2009:367), secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Terakhir menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif.

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima (5) tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu merupakan implementasi dari

salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan di dalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk (5) lima tahun ke depan. Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap (5) lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu (5) lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Perubahan yang terjadi mengikut kepada undang-undang dasar tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka undang-undang tersebut telah memberikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur dan Bupati/ Walikota secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar.

Pada saat ini pemilu secara nasional dilakukan dua macam yaitu pemilihan anggota legislatif (PILEG) dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dilembaga legislatif baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditingkat Pusat ataupun ditingkat Daerah. Disamping itu, diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES) secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan. Selain hal tersebut, masing-masing daerah juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota/Bupati dan Wakilnya yang langsung dipilih oleh rakyatnya juga.

Dalam Pemilu baik PILEG, PILPRES, maupun PILKADA peran serta keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PEMILU salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan

pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, '*voting*'; menghadiri rapat umum, '*campaign*'; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, '*contacting*' dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009:387).

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokratis untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas partai politik untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan itu dapat tercapai.

Cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilu melalui penguatan partai politiknya. Argumentasinya, bahwa partai politik diwajibkan melakukan pendidikan politik. Bukan malahan partai politik mengarahkan pemilih dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. Ketika pola atau cara ini masih direproduksi terus menerus, bisa dipastikan nilai dan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai dengan uang. Bukan karena kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja serta keberpihakannya dalam momentum pemilu.

Demikian pula halnya jika seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan pemilu, menurut Lipset dan Rokkan (1967:48) terdapat tiga unsur, yaitu: (1) adanya Objek Pemilu, (2) adanya sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elit atau para pejabat publik, (3) adanya sistem pemilihan (electoral sistem) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintah.

Di samping itu, ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan Sulaiman (1998:67), bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam

bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.

Selanjutnya, Sulaiman (1998:71) mengatakan, ada beberapa jenis partisipasi politik yaitu : (1) partisipasi pikiran (*psychological participation*), (2) partisipasi tenaga (*physical participation*), (3) partisipasi pikiran dan tenaga, '*psychological and physical participation*'; (4) partisipasi keahlian (*participation with skill*), (5) partisipasi barang (*material participation*), (6) partisipasi uang/dana (*money participation*).

Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula, walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu, (3) tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. Selama ini, kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka peneliti melakukan survei awal tentang apa saja yang menjadi permasalahan dan fenomena yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Barat yang telah dilaksanakan pada pemilu serentak tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Berdasarkan hasil survei awal yang saya lakukan di lokasi penelitian, tepatnya di desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o, Kabupaten Nias Barat maka peneliti menemukan beberapa persoalan, yaitu : (1) masih adanya angka Golput (Golongan Putih); (2) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemberian hak suara mereka pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; (3) kurangnya peran serta partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat; (4) masyarakat tidak menggunakan hati nuraninya untuk menentukan pilihan kepada para calon atau kandidat Bupati dan wakil Bupati; (5) adanya/terjadinya money politik dalam pemilihan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Hilisangawola, Kecamatan Ulu Moro'o, Kabupaten Nias Barat. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu : (1) data primer berupa rekaman atau video dan juga catat-mencatat saat wawancara akan dimulai. Dan (2) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: mengelompokkan, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisisnya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan sejak awal dengan cara analisis metode kualitatif yang bersifat deskriptif melalui metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan

hasil penelitian yang sudah dilakukan di lokasi penelitian, maka peneliti mendeskripsikan hasil wawancara dan data yang sudah terkumpul dengan cara mengelompokkan, menelaah, mengelola, menganalisa dan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

Berdasarkan Cakupan permasalahan di atas, maka hal ini bertujuan untuk mempersempit pembahasan atau mengambil inti dari keseluruhan permasalahan yang dapat memberikan gambaran secara luas tentang kajian dalam penelitian ini. Peneliti akan berusaha memberikan, menggali dan menguraikan pemahaman yang secara detail tentang pemecahan permasalahan yang ada. Untuk menjawab cakupan permasalahan penelitian di atas, maka peneliti akan menguraikan dan menjelaskan hasil yang sudah didapatkan dalam penelitian.

Identitas/Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah berjumlah (16) orang dimana masing-masing terdiri dari : (3) tiga orang PPS desa dan (1) satu orang Ketua KPPS, (2) dua orang pihak desa (Kepala Desa dan Ketua BPD) dan (10) sepuluh orang masyarakat desa Hilisangawola. Alasan saya memilih orang-orang sebagai informan dalam penelitian ini karena mereka merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung tentang pembahasan yang saya teliti. Selain itu, informan yang saya pilih juga dapat membantu peneliti dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam pembahasan skripsi yang saya teliti. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara acak dan jumlah informan dianggap cukup memperdalam dan juga memperluas informasi yang dibutuhkan peneliti dalam skripsi ini.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran secara umum tentang karakteristik informan penelitian, maka akan diuraikan secara rinci karakteristik informan penelitian pada tabel berikut ini :

Tabel. Karakteristik Informan Penelitian Secara Keseluruhan Menurut Kriteria Penelitian

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (f)	Umur/ Tahun	Frekuensi (f)	Jenis Kelamin	Frekuensi (f)
SD/Sederajat	-	<=15 Tahun	-	Lk	12
SMP/Sederajat	-	16-25	2		
SMA/Sederajat	13	26-35	7	Pr	4
SARJANA	3	36-55	7		
Jumlah	16	15-55	16	Lk/Pr	16

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan pemaparan tabel di atas tentang identitas dan karakteristik informan penelitian, maka dapat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para informan yang dipilih dalam penelitian dilihat secara kuantitas sudah cukup baik tetapi belum baik secara kualitas. Dimana, secara kuantitas rata-rata para informan memiliki pendidikan tamatan SMA dan Sarjana. Hal ini menunjukkan pengaruh pendidikan para informan dalam memberikan informasi kepada peneliti. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pengetahuannya. Para informan dalam penelitian ini memiliki pendidikan yang cukup baik, dimana tamatan SMA adalah (13) orang dan tamatan Sarjana (S1) adalah (3) orang.

Selain itu, tingkat umur juga sangat mempengaruhi daya pikir dan juga keaktifan seseorang dalam melaksanakan kegiatan maupun daya pikir seseorang dalam suatu pekerjaan. pada tabel di atas, tingkat umur informan menunjukkan bahwa para informan yang telah dipilih dalam penelitian ini adalah antara umur 16-25 adalah sebanyak (2) orang, antara umur 26-35 adalah (7) orang dan antara umur 36-55 adalah berjumlah (7) orang. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa para informan yang dipilih masih memberikan kontribusi dan keaktifan mereka dalam setiap kegiatan yang dilakoni para informan tersebut. Tingkat umur para informan dalam penelitian ini antara umur 25 tahun hingga 55 tahun. Selain itu, menurut pengamatan saya bahwa secara fisik juga sangat mendukung pelaksanaan setiap pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka karena masih memiliki fisik yang sehat secara jasmani.

Di samping itu, dalam pembahasan penelitian ini juga sangat penting bagaimana pengaruh jenis kelamin para informan yang berkaitan dengan kedudukan sosial maupun kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan baik dalam dunia partisipasi politik maupun dalam kesempatan kerja. Dari pemaparan tabel di atas, hal itu menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam hal ini perempuan yang setara dengan laki-laki. Dimana, dalam penelitian ini pihak laki-laki lebih mendominasi baik dalam selaku PPS dan KPPS dengan berjumlah (12) orang laki-laki dan (4) orang perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah tradisi atau culture dari setiap daerah yang masih menganggap bahwa perempuan/wanita hanya mengurus rumah tangga saja atau bekerja di bagian dapur dan mengerjakan pekerjaan tani/kebun. Selain itu, tingkat pendidikan perempuan juga masih rendah walau sudah mulai ada satu persatu yang memiliki pendidikan tinggi saat ini. Hal ini jauh lebih berbeda dengan laki-laki, dimana orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibanding perempuan.

Gambaran Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tanggal 09 Desember 2015 Khususnya Di Desa Hilisangawola

Gambaran umum merupakan paparan secara keseluruhan yang dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang hasil penelitian yang ditemukan di lokasi penelitian berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan juga dari data yang telah dikumpulkan dan diolah peneliti. Berdasarkan Hasil penelitian di lokasi penelitian, maka gambaran umum tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tanggal 09 Desember 2015, bahwa mulai tahapan persiapan dan hingga akhir pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat dapat dikatakan telah berjalan dengan baik sampai terpilihnya dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati yang baru periode 2016 hingga 2021.

Secara umum, gambaran tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 khususnya di desa Hilisangawola juga dijelaskan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) bahwa proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya di desa Hilisangawola yang dimulai dari tahap persiapan hingga penetapan jumlah suara sah dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya di desa Hilisangawola tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi dari semua pihak, baik dari pihak penyelenggara pemilu maupun dari masyarakat. Dimana, pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten selalu mengintruksikan agar kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU Kabupaten Nias Barat memberikan spanduk dan

poster di setiap desa melalui PPK dan PPS agar memasang spanduk dan poster mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tetapi, beberapa hal yang menjadi masukan terhadap masyarakat desa Hilisangawola maupun kepada pihak penyelenggara pemilu agar pihak penyelenggara lebih mengutamakan sosialisasi teknis daripada peningkatan partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu. Sehingga, banyak masyarakat yang tidak memahami dengan tujuan dan teknis yang disosialisasikan oleh pihak penyelenggara pemilu.

Untuk menambahkan gambaran tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat, maka peneliti mencantumkan Data Pemilih Tetap (DPT) dan juga jumlah suara yang sah dan tidak sah serta jumlah suara yang tidak melakukan pemilihan/pencoblosan pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tahun 2015. Berikut rinciannya pada tabel berikut ini :

Tabel. Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Jumlah Suara Sah, Jumlah Suara Tidak Sah Dan Jumlah Suara Tidak Memilih

No	Nama Daerah	DPT	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Memilih
1	Kab. Nias Barat	59.244	36.005	645	22.574
2	Kec. Ulu Moro'o	5.384	2.339	48	397
3	Desa Hilisangawola	1.312	420	5	887

Sumber : Data Primer, 2016

Kinerja Pihak Penyelenggara Pemilu Dalam Menyukkseskan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tanggal 09 Desember 2015

Pengertian kinerja dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005:1) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Menurut Irawan (2002:11), bahwa kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur.

Menurut Abdulsyani (2007: 94) "Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya". Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan- harapan baru.

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disanadiatur bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UU 27 Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:

1. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:
 - merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
 - melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:
 - merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
3. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti:
 - menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
 - mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
 - melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

Berdasarkan uraian teori di atas, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pihak penyelenggara pemilu baik dari KPU Kabupaten Nias Barat, PPK maupun PPS dan KPPS merupakan kunci dan faktor utama terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Nias Barat. Untuk mengetahui kinerja penyelenggara pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat, maka peneliti melakukan wawancara secara eksklusif kepada kepala desa Hilisangawola yaitu Bapak Budieli Gulo. Berikut hasil wawancara saya dengan beliau :

“bahwa kinerja pihak penyelenggara PEMILUKADA di Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal itu saya katakan, bahwa pihak penyelenggara pemilu telah bekerja secara maksimal sesuai dengan tata aturan dan sistem yang berlaku. Selain itu, keberhasilan pihak penyelenggara pemilu juga dapat dilihat dengan hasil kinerja hingga penetapan suara sah yang dimulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Nias Barat dalam menentukan pemenang PEMILUKADA Nias Barat tanpa masalah dan ketimpangan yang terlalu signifikan sehingga proses pelaksanaan PEMILUKADA di Nias Barat mulai dari tahap persiapan hingga penetapan pemenang suara terbanyak telah berjalan dengan baik. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa menurut saya ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan tingkatkan yaitu pihak penyelenggara pemilu harus lebih aktif memberikan sosialisasi dan wawasan kepada masyarakat tentang pemilu baik melalui komunikasi langsung maupun dengan berbagai spanduk dan poster yang disebarluaskan di pelosok

dan di desa-desa". (Jum'at, 10 Juni 2016, Pukul 09:30 WIB, di Kantor Kepala desa Hilisangawola).

Dari penjelasan kepala desa Hilisangawola di atas, jelas memberikan gambaran secara umum maupun secara detail kepada peneliti bahwa kinerja pihak penyelenggara pemilu mulai dari KPU Kabupaten Nias Barat, PPK Kecamatan hingga PPS dan KPPS di desa Hilisangawola sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dikatakan bahwa mulai tahap persiapan pelaksanaan hingga tahap penetapan suara sah dan juga penetapan pemenang PEMILUKADA tidak ada persoalan atau sengketa yang berarti walau masih ada beberapa yang tidak berjalan sepenuhnya dengan baik dan efektif. Kinerja pihak penyelenggara pemilu telah melakukan upaya agar masyarakat tersu meningkatkan partisipasi politiknya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat melalui PPS dan KPPS di desa dengan berbagai ragam cara, mulai dari komunikasi langsung kepada masyarakat maupun melalui surat yang disebarkan kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan hak suara yang dimiliki saat pencoblosan dan juga teknis pecoblosan yang sesuai dengan aturan.

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tanggal 09 Desember 2015 Khususnya Di Desa Hilisangawola

Dalam perspektif pengertian yang generik, Budiardjo (1998:2) memaknai partisipasi politik adalah: kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Selanjutnya secara eksplisit, Huntington dan Nelson (1994:11), membedakan partisipasi politik kedalam (2) dua karakter, yaitu:

1. Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela;
2. Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh Pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan.

Berdasarkan uraian teori di atas, partisipasi yang lebih ditekankan pada pembahasan ini adalah tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu, dimana hal itu lebih difokuskan pada partisipasi dalam memberikan hak suara politiknya dan juga rasa antusiasme masyarakat terhadap penyambutan dan keberhasilan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Nias Barat. Selanjutnya, untuk mengetahui secara langsung partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa Hilisangawola yaitu dengan Bapak Te'ali Gulo. Berikut pernyataan beliau tentang tingkat partisipasi politik masyarakat desa Hilisangawola terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu :

“bahwa dalam mengamalkan pancasila dan UUD 1945 dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kedaulatan ada ditangan rakyat serta demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA merupakan salah

satu hal yang sangat penting selain sebagai penentu arah kepemimpinan daerah selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan hal itu, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu telah berjalan dengan baik walau masih ada yang perlu ditingkatkan dan dibenahi demi kebaikan dimasa yang akan datang. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu masih rendah. Hal itu dapat dilihat dengan angka partisipasi masyarakat yang hanya mencapai 55% dari jumlah DPT yang ada. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di desa Hilisangawola adalah 1.237 jiwa. Sedangkan jumlah yang menggunakan hak pilihnya atau yang memberikan suara politiknya pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nias Barat adalah berjumlah sekitar 680 suara. Selain itu, dengan jumlah suara yang menggunakan hak pilihnya masih terdapat beberapa suara tidak sah atau suara batal akibat dari kesalahan pencoblosan pada hari pemilihan. Jumlah suara tidak sah atau suara batal adalah 113 suara. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat terhadap teknis pencoblosan suara yang masih kurang. Jadi, berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami dengan jelas bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu”. (Senin, 13 Juni 2016, Pukul 09:15 WIB, di Rumah Pribadi Bapak Te’ali Gulo di dusun I Sinarikhi, desa Hilisangawola).

Selain pernyataan Ketua PPS di atas, maka sangat penting untuk menggali informasi dari Ketua KPPS yang turun langsung ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat mengetahui secara langsung seluk-beluk tingkat partisipasi masyarakat di setiap TPS yang telah disediakan. Berikut pernyataan Ibu Agnes selaku Ketua KPPS di desa Hilisangawola :

“bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu menurut saya kurang menarik bagi kalangan masyarakat desa Hilisangawola. Selain itu, uforia dan antusiasme masyarakat terhadap PEMILUKADA Nias Barat 2015 juga tidak begitu menggairahkan bagi masyarakat desa Hilisangawola. Hal itu saya dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang datang ke setiap TPS untuk menggunakan hak politiknya dalam hal ini yang melakukan pencoblosan di setiap TPS dengan menentukan pilihan kepada pemimpin Kabupaten Nias Barat selama 5 tahun ke depan periode 2016-2021. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya terutama dalam hal menentukan pemimpinnya selama 5 tahun ke depan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam PEMILUKADA dan kurangnya peran dari setiap partai politik untuk memberikan pendidikan dan semangat kepada masyarakat sebagai salah satu tugas dan fungsi partai politik dan kemudian, masyarakat kurang tertarik dengan figur calon Bupati dan Wakil Bupati yang ada”. (Selasa, 14 Juni 2016, Pukul 09:30 WIB, di Rumah Pribadi Ibu Agnes di dusun I Sinarikhi, desa Hilisangawola).

Dari penejasan dan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian, berdasarkan hasil analisis maka dapat dipahami bahwa PEMILUKADA seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung menjadi bagian dari penentu arah kepemimpinan selama 5 tahun ke depan. Dengan cara inilah, pesta demokrasi dapat diwujudkan secara nyata yang datang dari masyarakat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sesuai dengan hasil penelitian yang saya lakukan dan berdasarkan informasi dari beberapa narasumber di lokasi penelitian maka dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 Desember 2015 yang lalu masih rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya kesadaran, kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam PEMILUKADA. Selain itu, kepemimpinan kepala desa juga merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat, peran dan dukungan partai politik juga tidak ada dan pengaruh figur calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat yang tidak begitu mendapat kepercayaan publik di desa Hilisangawola.

Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Desa Hilisangawola Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tanggal 09 Desember 2015

Faktor penghambat pada umumnya bisa terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam pembahasan ini, faktor internal ditujukan pada partisipasi politik masyarakat desa, sedangkan faktor eksternal ditujukan pada pengaruh luar atau pendukung dari masyarakat yang seharusnya dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa dalam PEMILUKADA di Nias Barat.

Untuk mengetahui faktor yang dapat menghambat partisipasi politik masyarakat desa Hilisangawola dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 Desember 2015, maka peneliti menguraikannya ke dalam (2) dua bagian, yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

Faktor internal adalah merupakan hambatan atau kendala yang datang dari dalam masyarakat desa itu sendiri yang menyebabkan tingkat partisipasi politik masyarakat tidak sepenuhnya dapat direalisasikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 Desember 2015 yang lalu.

Adapun faktor internal yang menghambat partisipasi politik masyarakat desa Hilisangawola terhadap pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tanggal 09 Desember 2015 berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat terhadap PEMILUKADA,
2. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penentu arah kepemimpinan selama 5 tahun ke depan,
3. Kepemimpinan kepala desa yang kurang profesional dan adanya unsur kepentingan politik pribadi,
4. Masyarakat yang masih sebagian besar adalah masyarakat tradisional,
5. Jarak antara TPS dan kediaman sebagian besar masyarakat yang kurang mendukung atau jauh dari lokasi.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah merupakan faktor penghambat atau kendala yang terjadi dalam melaksanakan dan juga memaksimalkan partisipasi politik masyarakat desa dalam

pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 khususnya di desa Hilisangawola yang diberikan oleh pihak yang mendukung dan pelaksana PEMILUKADA.

Adapun faktor penghambat atau kendala yang terjadi di luar masyarakat desa Hilisangawola yang menyebabkan tingkat partisipasi politik masyarakat desa tidak maksimal adalah sebagai berikut :

1. Figur calon Bupati dan Wakil Bupati yang kurang menggairahkan,
2. Peran dan dukungan partai politik yang tidak ada sama sekali dalam memberikan pendidikan dan semangat kepada masyarakat,
3. Kinerja dan keefektivan pihak penyelenggara PEMILUKADA yang masih kurang baik dan kurang memadai,
4. Kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat,
5. Kepemimpinan kepala desa yang kurang profesional.

Sumber : Hasil Wawancara Dan Data Primer, 2016.

Tanggapan Masyarakat Desa Hilisangawola Terhadap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tanggal 09 Desember 2015

Pemilu merupakan momentum bagi masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi dan pengamalan UUD1945 sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan pelaku utama dan sasaran dari setiap kebijakan yang ada. Masyarakat juga sebagai penentu arah kepemimpinan selama 5 tahun ke depan melalui pemilu dengan menggunakan hak politiknya sebaik mungkin dan menggunakan hati nurani dalam menajutuhkan pilihan kepada calon pemimpin yang dianggap baik dan mampu. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan juga sekaligus tanggapan masyarakat terhadap pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu, maka di bawah ini akan ditampilkan pernyataan masyarakat dan juga pandangan masyarakat desa Hilisangawola.

1. Menurut Bapak Paostinus Lombu, mengatakan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu sudah berjalan dengan baik secara keseluruhan. Dimana, pihak penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya hingga penetapan calon pemenang di PILKADA Bupati dan Wakil Bupati.
2. Menurut Bapak Pdt.Hasatulo Halawa, S.Th, mengatakan bahwa PILKADA kali ini merupakan pemilu yang ke-2 yang telah dilaksanakan di kabupaten Nias Barat. Tentunya, hal ini merupakan momentum bagi seluruh masyarakat Nias Barat secara umum dan bagi masyarakat desa Hilisangawola pada khususnya dalam mewujudkan partisipasi politiknya melalui pemilihan umum kepala daerah. PILKADA kali ini sedikit jauh dari harapan dan interpretasi masyarakat dimana para penyelenggara pemilu dan juga seluruh pendukung terlaksananya PILKADA di Nias Barat kurang efektif dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Sehingga, partisipasi politik masyarakat sangat rendah dan bahkan antusiasme masyarakat kurang begairah.
3. Menurut Ibu Lisami Lombu, mengatakan bahwa kepedulian dan kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat. Hal itu disebabkan juga

- dengan kurangnya peran semua pihak baik dari partai politik penyelenggara pemilu maupun dari keinginan masyarakat itu sendiri. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat masih rendah.
4. Menurut Ibu Suveniyat Gulo, S.Pd, mengatakan bahwa PILKADA dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Untuk itu, seluruh elemen, baik dari pihak penyelenggara pemilu mulai dari KPU Kabupaten, PPK di Kecamatan, maupun PPS dan KPPS di desa harus lebih kerja keras untuk menyemangati dan memotivasi masyarakat serta memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar seluruh elemen masyarakat dapat ikut terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tetapi, yang saya perhatikan, hal tidak dilaksanakan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat jadi berkurang.
 5. Menurut Bapak Hatisaro Lombu, mengatakan bahwa kepemimpinan kepala juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada di desa. Kepemimpinan kepala desa juga sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan politik demi mencapai hasil dan arah politik yang lebih baik. Profesionalitas dan tanggungjawab kepala desa selaku pemimpin pemerintahan desa membutuhkan arahan dan konsultatif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember yang lalu, kepemimpinan kepala desa justru terkesan pribadi dan adanya unsur politik pribadi yang tidak melakukan koordinasi kepada masyarakat dan serasa seperti terdiam pada masa-masa PILKADA. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap PILKADA Nias Barat. Oleh karena itu, menurut saya bahwa seluruh elemen masyarakat baik dari penyelenggara pemilu, pelaksana, calon kepala daerah maupun seluruh pendukung terlaksananya pemilu yang jujur, adil dan demokratis agar bersama-sama mengedepankan nilai-nilai demokrasi sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan penjelasan teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang “ Partisipasi Politik Masyarakat Dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanggal 09 Desember 2015 Di Kabupaten Nias Barat”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik masyarakat desa Hilisangawola dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu masih rendah. Keaktifan dan keterlibatan masyarakat desa Hilisangawola dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember juga masih kurang yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam pemilu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi PILKADA.
2. Kepemimpinan kepala desa Hilisangawola dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu masih belum dapat diimplementasikan sebagaimana fungsi dan tujuan kepemimpinan yang profesional. Selain itu, kepemimpinan kepala desa dalam politik cenderung bersifat pribadi tanpa melakukan berkonsultasi dengan masyarakat.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tanggal 09 desember 2015 yang lalu secara keseluruhan telah berjalan dengan baik hingga penetapan secara sah

pemenang PILKADA. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kelemahan, seperti kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. (1998). *Partisipasi Dan partai Politik*. Jakarta : YOI.
- . (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- . (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Khairul. (2011). *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan rakyat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Friedman, Lawrence. (2009). *The Legal System : A social Science perspective*. Penerjemah : M. Khozim. Bandung : Nusamedia.
- H.B. Siswanto. (2006). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hendarso. (2005). *Metode Dalam Data*. Jakarta : Salemba Manajemen.
- Horowitz, L. Donald. (2003). *Electoral System And Their Goals : A Primer For Desicion-Makers, Paper On James Duke Prof. Of Law And Political Science, Duke University*. North California : Durham.
- Irene, Siti, A.D. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini. (1994). *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Press.
- . (2009). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Lipset, S. Dan Rokkan, S. (eds). (1967). *Party System And Voter Alignments*. NewYork: Oxford University Press.
- Margono S. (2007). *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Masdar, Umaruddin, dkk. (1999). *Mengasah Naluri Publik Memahami nalar Politik*. Yogyakarta : LKIS Dan The Asia Foundation.
- Miftah, Thoha. (1983). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali.
- Moh. Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moloeng. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Nawawi, Hadari. (1995). *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta : UGM Press.
- Patton. (1998). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Reynolds, Andrew. (2001). *Merancang Sistem Pemilihan Umum Dalam Juan J. Linz, dkk. Menjauhi Kaum Penjahat : Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. Bandung : Mizan.
- Riduwan. (2004). *Metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Siagian, P. Sondang. (2007). *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Sitepu, P. Anthonius. (2012). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyah. (2001). *Partisipasi Masyarakat Dalam Politik*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung : Alfabeta.



- Sulaiman. (1998). *Media Pendidikan*. Jakarta : CV Rajawali.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- _____. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- _____. (2012). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widya Sarana
- Tricahyono, Ibnu. (2009). *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. Malang : In Trans Publishing.
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

Sumber Lain :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa



Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang PILKADA

<http://mardaianaajhaa.blogspot.co.id/2013/06/makalah-partisipasi-politik-di.html>

<https://francoviagem.wordpress.com/2011/09/28/tinjauan-pustaka/>